



## Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai Kepada Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar

Dwi Adriani Sumantri <sup>1)</sup>; Asima Yanty Sylvania Siahaan <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Student of Public Administration, Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, University of North Sumatra

<sup>2)</sup> Lecturer of Public Administration, Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, University of North Sumatra

Email: <sup>1)</sup> [dwiadriani95@gmail.com](mailto:dwiadriani95@gmail.com) ; <sup>2)</sup> [asimayantysiahaan@gmail.com](mailto:asimayantysiahaan@gmail.com)

### ARTICLE HISTORY

Received 08 November 2022]  
Revised [29 November 2022]  
Accepted [14 Desember 2022]

### KEYWORDS

Effectiveness, Cash Social Assistance, COVID-19 Pandemic

### ABSTRAK

Setelah ditetapkannya COVID-19 sebagai bencana nasional pemerintah melalui Kementerian Sosial meluncurkan program Bantuan Sosial Tunai untuk masyarakat terdampak wabah COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam mengenai Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai Kepada Masyarakat Terdampak Pandemi COVID-19 di Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai kepada Masyarakat Terdampak Pandemi COVID-19 di Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar belum efektif. Hal ini dilihat dari pendataan yang dilakukan masih belum memenuhi ketepatan sasaran program dikarenakan kurangnya ketelitian pengelola program dalam proses pendataan peserta program. Selain itu, sosialisasi antara pengelola program dengan masyarakat tidak berjalan dengan baik karena tidak ada melaksanakan sosialisasi. Dengan demikian, keterkaitan dari unsur-unsur tersebut mengakibatkan ketidaktepatan sasaran program, kurangnya kinerja pengelola program, dan tidak tercapainya tujuan program.

### ABSTRACT

After the stipulation of COVID-19 as a national disaster, the government through the Ministry of Social Affairs launched the BST program for communities affected by the COVID-19 outbreak. This study aims to describe in depth the effectiveness of the Cash Social Assistance Program for Communities Affected by the COVID-19 Pandemic in Timbang Galung Village, Siantar Barat District, Pematangsiantar City. The method used in this research is descriptive research method with a qualitative approach. Data collection techniques were carried out by means of interviews, observation, and documentation. The results showed that the Effectiveness of the Cash Social Assistance Program to Communities Affected by the COVID-19 Pandemic in Timbang Galung Village, West Siantar District, Pematangsiantar City, has not been effective. This can be seen from the data collection carried out that still does not meet the accuracy of the program due to the lack of accuracy of program managers in the process of collecting data on program participants. In addition, the socialization between program managers and the community did not go well because there was no socialization implementation. Thus, the linkage of these elements results in inaccuracy of program targets, lack of performance of program managers, and not achieving program objectives.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



## PENDAHULUAN

Penyebaran wabah COVID-19 yang sangat cepat memberikan imbas yang besar bagi negara-negara di seluruh dunia. Wabah virus corona tidak hanya merugikan dari sisi kesehatan saja, melainkan juga mempengaruhi perekonomian negara. Dampak perekonomian yang ditimbulkan dari pandemi telah terjadi di beberapa negara secara signifikan, salah satunya terjadi di negara Indonesia. Hanoatubun (2020: 151) dalam penelitiannya menjabarkan dampak perekonomian di Indonesia yang ditimbulkan akibat COVID-19 bahwa sebanyak 1,5 juta pekerja yang dirumahkan serta terkena PKH, penurunan impor pada triwulan I sebesar 37% *year-to-date (ytd)*, inflasi yang mencapai 2,96% *year-on-year (yoy)*, penurunan jumlah kunjungan turis hingga 6.800/hari, serta penurunan okupansi hingga 5% pada 6.000 hotel.

Kecemasan masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya semakin meningkat akibat menyebarnya COVID-19 secara terus menerus. Penyebab utamanya adalah semakin banyak masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak bisa berdagang. Livana (2020: 42-43) dalam penelitiannya mengatakan bahwa penurunan pendapatan yang relatif rendah juga dialami oleh

masyarakat yang bekerja secara informal dengan pendapatan harian dan pendapatan tidak pasti. Hal tersebut kemudian mengakibatkan konsumsi masyarakat yang bekerja di sektor informal menjadi menurun.

Pandemi COVID-19 mengakibatkan tingkat kemiskinan serta pengangguran menjadi naik. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2020 mengemukakan bahwa persentase penduduk miskin di Indonesia sebesar 9,87%, namun pada September 2020 mengalami peningkatan menjadi 10,19% serta pengangguran di Indonesia mengalami peningkatan yang begitu besar yaitu terdapat 19,10 juta orang (9,30% penduduk usia kerja) yang terdampak Covid-19. Pengangguran akibat COVID-19 tersebut terdiri dari 1,62 juta orang pengangguran, dan 15,72 juta penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja akibat COVID-19.

Peningkatan jumlah penduduk miskin yang terjadi akibat COVID-19 dikarenakan kegiatan perekonomian tidak bisa berjalan seperti biasa, sehingga pendapatan masyarakat menurun bahkan sebagian masyarakat lainnya kehilangan mata pencahariannya. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk menjalankan berbagai program dalam rangka memberikan Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi masyarakat terdampak COVID-19. JPS adalah alat yang digunakan oleh pemerintah untuk mengurangi dampak sosial akibat adanya krisis dan JPS ditujukan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. (Paitoonpong, 2008).

Program JPS yang dilaksanakan oleh pemerintah di masa pandemi COVID-19 salah satunya adalah Bantuan Sosial Tunai (BST). Setelah ditetapkannya COVID-19 sebagai bencana nasional dan masih berlangsung sampai saat ini, pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) meluncurkan program BST untuk masyarakat terdampak wabah COVID-19.

Program BST diatur dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 86/Huk/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/Huk/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 161/Huk/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Tahun 2021.

Menurut Keputusan Direktur Jenderal Fakir Miskin Nomor 22/6/Sk/Hk.02.02/6/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Fakir Miskin Nomor 18/6/Sk/Hk/02.02/4/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak Corona (Covid-19), BST diberikan setiap bulannya kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dilaksanakan sejak bulan April 2020 yang terdiri dari tahap I sampai tahap IX. Besaran nilai BST untuk tahap I hingga tahap III sebesar Rp600.000/orang dan untuk tahap IV hingga tahap XIV sebesar Rp300.000/orang.

Program Bantuan Sosial Tunai dilakukan dengan tujuan untuk tetap menjaga daya beli masyarakat akibat pandemi wabah virus corona (COVID-19). Namun, tujuan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik. Kementerian Sosial telah menyalurkan program BST kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Besarnya jumlah penerima program BST memunculkan permasalahan dalam pendataan. Permasalahan tersebut disebabkan oleh adanya ulah pengelola program BST yang tidak bertanggung jawab melaksanakan tugasnya dalam pendataan sehingga mengakibatkan ketidaktepatan sasaran.

Ketidaktepatan sasaran yang terjadi di salah satu daerah yaitu Jakarta, dalam penyaluran BST masih terdapat data penerima yang tidak akurat. Menurut data koalisi menyebutkan sebanyak 600 keluarga tidak mampu yang memiliki KTP DKI di 25 Kelurahan tidak mendapatkan BST, namun 75 keluarga mampu di 12 Kelurahan justru mendapatkan BST serta terdapat 135 keluarga di 16 Kelurahan mendapat BST meski masyarakat juga menerima program santunan lain, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) (Parikesit, 2021).

Permasalahan lain yang berkaitan dengan efektivitas juga dinyatakan dalam penelitian Melati dan Zulkarnaini (2021: 25) ditemukan hasil penelitian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang masih tumpang tindih, hal ini dibuktikan dengan data awal yang menjadi acuan adalah data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sehingga program diberikan tidak tepat sasaran. Selain itu, ditemukan beberapa aparat yang berperan dalam pelaksanaan program BST yang masih belum sepenuhnya memahami juknis yang telah diberikan, begitupun masyarakat tidak memahami alasan dan tujuan pemerintah memberikan BST kepada mereka, serta kurang sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat.

Permasalahan lainnya yaitu dugaan pemotongan dana Bantuan Sosial Tunai (BST) sebesar Rp600.000 maupun bantuan sembako di lima daerah Sumatera Utara yaitu Kota Medan, Kota Pematang Siantar, Kabupaten Toba, Kabupaten Samosir, dan Kabupaten Deli Serdang (Sianturi, 2021). Oleh karena itu, maka diperlukannya pengawasan serta laporan yang ketat dan memberikan sanksi pada



pihak yang terkait (pelaku) serta meningkatkan kesadaran moral pada masyarakat dan lembaga negara yang bertujuan untuk mengurangi kasus korupsi di Indonesia

Berdasarkan hasil pra-penelitian dengan masyarakat Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar ditemukan bahwa program BST yang direalisasikan oleh pemerintah tersebut belum diberikan secara merata. Pasalnya masih terdapat masyarakat miskin yang terdampak COVID-19 tidak mendapatkan bantuan tersebut akibat dari kelalaian petugas dalam proses pendataan peserta program serta masih terdapat unsur kekerabatan antara petugas pendataan program dengan masyarakat. Selain itu, sosialisasi dari pihak pemerintah Kelurahan Timbang Galung kepada masyarakat dirasa masih kurang, masih terdapat masyarakat yang tidak mengetahui adanya program BST serta tujuan dari program tersebut.

## LANDASAN TEORI

Steers (2020: 6) menyatakan, “Efektivitas dapat dinilai menurut ukuran seberapa jauh sebuah organisasi berhasil mencapai tujuan organisasi yang layak dicapai”. Efektivitas berarti berusaha untuk dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, sesuai dengan rencana untuk memperoleh hasil yang maksimal. Efektivitas merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan, dan menunjukkan derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang dicapai.

Menurut Tjokroamidjojo (dalam Pasolong 2017: 4) mengatakan bahwa efektivitas, agar pelaksanaan administrasi lebih mencapai hasil seperti direncanakan, mencapai sasaran tujuan yang ingin dicapai dan lebih berdaya hasil. Sedangkan menurut Keban (dalam Pasolong 2017: 4) mengatakan bahwa suatu organisasi dapat dikatakan efektif kalau tujuan organisasi atau nilai-nilai sebagaimana ditetapkan dalam visi tercapai. Nilai-nilai yang telah disepakati bersama antara para *stakeholder* dari organisasi yang bersangkutan.

Menurut Tjokroamidjojo (dalam Pasolong 2017: 4) mengatakan bahwa efektivitas, agar pelaksanaan administrasi lebih mencapai hasil seperti direncanakan, mencapai sasaran tujuan yang ingin dicapai dan lebih berdaya hasil. Sedangkan menurut Keban (dalam Pasolong 2017: 4) mengatakan bahwa suatu organisasi dapat dikatakan efektif kalau tujuan organisasi atau nilai-nilai sebagaimana ditetapkan dalam visi tercapai. Nilai-nilai yang telah disepakati bersama antara para *stakeholder* dari organisasi yang bersangkutan.

Efektivitas menurut Kurniawan (2005: 109) adalah kemampuan seseorang untuk melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari suatu organisasi dengan tidak ada tekanan atau ketegangan diantara pelaksananya. Sedangkan menurut Mahsun (2006: 182) menjelaskan bahwa efektivitas (hasil guna) merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Pengertian efektivitas ini pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan.

Efektivitas program merupakan suatu cara untuk mengukur sejauh mana suatu program dapat berjalan, guna mencapai tujuan yang telah diterapkan sebelumnya. Penilaian terhadap tingkat kesesuaian program merupakan salah satu cara untuk mengukur efektivitas program. Menurut Julia (2010: 26) efektivitas program dirumuskan sebagai suatu tingkat perwujudan sasaran untuk melihat seberapa jauh sasaran dan target program yang telah ditetapkan berjalan dengan baik. Selain itu, Makmur (2011: 6) berpendapat bahwa efektivitas program merupakan kegiatan yang pelaksanaannya menampakkan ketepatan antara harapan yang diinginkan dengan hasil yang dicapai, di mana ditunjukkan dengan ketepatan harapan, implemmentasi, dan hasil yang dicapai.

*Social Safety Net* (SSN) adalah konsep yang dirancang untuk membantu rakyat miskin yang terkena dampak akibat krisis ekonomi dan dilaksanakan melalui tahapan penyelamatan dan pemulihan menuju pada kondisi yang normal (Kaharudin, 2020: 107-108). *Social Safety Net* mempunyai tujuan utama yaitu memicu dan memacu upaya penyelamatan (*rescue*) dan pemulihan (*recovery*) ekonomi yang melanda masyarakat di Indonesia. Secara khusus SSN diarahkan untuk meningkatkan upaya penanggulangan dampak krisis terutama penduduk rentan krisis yang berada di desa/kelurahan yang paling parah terkena dampak krisis (Sumodiningrat, 1999).

## METODE PENELITIAN

### Metode Analisis

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2013: 9) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Dengan demikian peneliti akan mengumpulkan informasi terkait dengan Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai Kepada Masyarakat Terdampak Pandemi COVID-19 di Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar.

Lokasi dalam penelitian ini yaitu di Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sementara untuk informasi yang akurat, penulis menggunakan teknik purposive sampling dalam menentukan informan penelitian. Adapun kriteria dari informan penelitian adalah Dinas Sosial, Kantor Kelurahan, BST Kelurahan Timbang Galung. Dengan demikian, penulis memilih Kepala Bidang Sosial, Lurah, Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum, Kepala RT, masyarakat penerima BST dan masyarakat yang layak menerima bantuan program tetapi tidak dapat BST.

Setelah informasi dikumpulkan, maka penulis akan melakukan analisis data dengan teknik analisis yang dilakukan secara interaktif, yaitu dengan cara mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Sementara untuk teknik keabsahan data, penulis menggunakan triangulasi data, dengan membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara antar subjek penelitian yang satu dengan yang lain, kemudian membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dan dokumentasi sehingga memperoleh suatu kesimpulan

Sementara untuk teknik keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik sebagai teknik keabsahan data. Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi teknik digunakan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Teknik triangulasi digunakan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap informan dengan hasil pengamatan peneliti terkait Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai kepada Masyarakat Terdampak Pandemi COVID-19 di Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pembahasan

Menurut Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 18/6/SK/HK.02.02/4/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disiase* 2019 (COVID-19) disampaikan bahwa Program Bantuan Sosial Tunai merupakan program bantuan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui kementerian Sosial Republik Indonesia dalam rangka memberikan stimulus Jaringan Pengaman Sosial di tangan masa pandemi COVID-19 dan bantuan ini berupa uang yang diberikan kepada keluarga miskin, tidak mampu atau rentan terkena dampak wabah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Dalam penelitian ini Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai Kepada Masyarakat Terdampak Pandemi COVID-19 di Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar dikaji berdasarkan dimensi efektivitas yang dikemukakan oleh Steers (2020: 9) yang terdiri dari karakteristik organisasi, karakteristik lingkungan, kebijakan dan praktik manajemen.

### Karakteristik Organisasi

Karakteristik organisasi menurut Steers (2020: 100) mengatakan bahwa efektivitas dapat dipandang sebagai fungsi dari kemampuan organisasi dalam menjalankan suatu program dengan memadukan teknologi, struktur dengan faktor-faktor sosial menjadi kesatuan yang selaras dan berorientasi tujuan. Karakter organisasi terbagi ke dalam dua bagian yaitu struktur organisasi dan teknologi.

#### 1. Struktur Organisasi

Salah satu variabel efektivitas program dalam struktur organisasi adalah spesialisasi atau pembagian tugas. Pembagian tugas adalah penjabaran tugas secara spesifik yang harus dikerjakan setiap pegawai di dalam suatu organisasi dan bertanggungjawab untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dalam melaksanakan suatu kegiatan program. Dalam pelaksanaan program pembagian tugas juga sangat berpengaruh terhadap efektivitas program seperti, waktu yang



digunakan lebih optimal, terperinci sehingga tidak menyebabkan banyak kesalahan dalam melaksanakan suatu program.

Pembagian tugas yang dilakukan oleh pemerintahan Kelurahan Timbang Galung yaitu memberikan dan membagi tugas setiap masing masing RT untuk melakukan pendataan pada warga terdampak COVID-19 yang membutuhkan bantuan dengan melengkapi persyaratan dan berkas-berkas yang telah ditentukan sebelumnya. Data nama-nama dan berkas yang sudah diterima RT kemudian diserahkan kepada Kantor Lurah Timbang Galung untuk diperiksa kelengkapan berkasnya. Selanjutnya pihak Kantor Lurah akan mengirimkan berkas tersebut kepada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar yang selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan kembali lalu akan dikirimkan ke pemerintah pusat yaitu Kementerian Sosial untuk di proses ke tahap selanjutnya.

Pembagian tugas dalam pelaksanaan Program Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Timbang Galung bertujuan untuk meminimalisir waktu dan mempermudah dalam proses pendataan peserta agar sasaran penerima program sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Bantuan sosial tunai adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada keluarga miskin, tidak mampu dan rentan yang terkena dampak wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang telah diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 18/6/Sk/Hk 02.02/4/2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Namun, pada kenyataannya tujuan tersebut tidak dapat terealisasi dengan baik akibat dari kesalahan petugas yang tidak mendata peserta program sesuai dengan kriteria sehingga menyebabkan Program Bantuan Sosial Tunai belum tepat sasaran.

Berdasarkan penjelasan dari Pemerintah Kelurahan Timbang Galung, dapat diketahui bahwa ketepatan sasaran Program Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Timbang Galung belum tepat sasaran. Kelalaian petugas dalam proses pendataan masyarakat calon penerima program menyebabkan ketidaktepatan sasaran Program Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Timbang Galung.

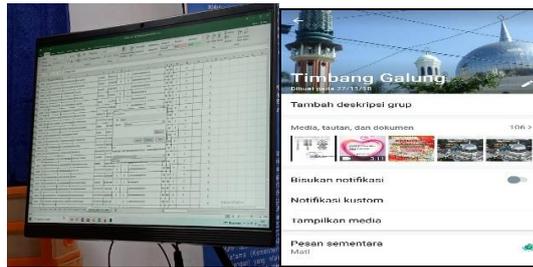
Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat dapat diketahui bahwa sasaran Program Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Timbang Galung belum tepat sasaran. Masyarakat yang mendapatkan program BST maupun yang tidak mendapatkan bantuan tersebut mengatakan terdapat masyarakat mampu yang masih mendapatkan program BST dapat dilihat dari uang yang didapatkan tidak dipergunakan untuk keperluan pokok melainkan keperluan sekunder, masih terdapatnya unsur kekerabatan petugas pendataan dengan masyarakat yang menyebabkan kecenderungan untuk memilih seseorang untuk mendapatkan program BST yang mengakibatkan tidak efektif. Oleh karena itu, masyarakat meminta agar pemberian Program Bantuan Sosial Tunai ini diberikan kepada masyarakat yang sangat membutuhkan.

Hasil obesrvasi peneliti di Kelurahan Timbang Galung terkait sasaran program yaitu peneliti melihat Program Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Timbang Galung belum tepat sasaran. Hal tersebut terlihat dari masih terdapat masyarakat miskin yang tidak mendapatkan Bantuan Sosial Tunai tetapi masyarakat mampu yang mendapatkan bantuan tersebut. Selain itu, berdasarkan hasil pengamatan peneliti Ketua RT juga mengajukan masyarakat sebagai calon penerima peserta program tanpa adanya melakukan survei terlebih dahulu kepada masyarakat tersebut layak atau tidak untuk mendapatkan bantuan serta masih terdapat unsur kekerabatan antara petugas pendata dengan masyarakat penerima program BST. Oleh karena itu, agar pendataan peserta Program Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Timbang Galung tepat sasaran maka dibutuhkan pengawasan yang ketat dalam proses pendataan dan perlu adanya survei terlebih dahulu sebelum mencalonkan masyarakat sebagai penerima program BST.

## 2. Teknologi

Menurut Steers (2020:9) mengatakan teknologi adalah mekanisme suatu organisasi yang digunakan dalam mengembangkan dan menunjang kegiatan terkait program. Hadirnya teknologi juga memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sehari-hari manusia maupun suatu organisasi. Teknologi digunakan suatu organisasi untuk mengubah suatu input menjadi output dalam mencapai tujuan organisasi (Steers 2020:9). Dengan adanya teknologi yang canggih dan berkualitas maka pelaksanaan program Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kelurahan Timbang Galung menjadi lebih efisien. Seperti dalam pendataan peserta program, sosialisasi program serta penyaluran program Bantuan Sosial Tunai (BST).

### Gambar 1 Teknologi yang digunakan Kantor Lurah Timbang Galung



Sumber: Kantor Lurah Timbang Galung, 2021

Gambar di atas adalah teknologi yang digunakan oleh Pemerintahan kelurahan Timbang Galung untuk melaksanakan Program Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Timbang Galung yaitu dengan menggunakan komputer untuk menginput data melalui *microsoft excel* dan menggunakan aplikasi *whatsapp*. Pemerintahan Kelurahan Timbang Galung menggunakan aplikasi *whatsapp* dengan tujuan untuk dapat berkomunikasi antar pegawai dan dapat memberikan informasi terbaru terkait program BST dengan cepat dimana dan kapanpun tanpa harus berada di kantor lurah. Dengan itu pemerintahan Kelurahan Timbang Galung membuat sebuah grup *whatsapp* agar memudahkan setiap pegawai dalam mengakses dan memberikan informasi yang berkaitan dengan program Bantuan Sosial Tunai.

Berdasarkan penjelasan dari Pemerintahan Kelurahan Timbang Galung, dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan Program Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Timbang Galung teknologi yang digunakan yaitu komputer atau laptop melalui *microsoft excel* dan *microsoft word* untuk menginput data nama-nama yang mendaftar program Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Timbang Galung dan menggunakan printer untuk mencetak dokumen yang diperlukan terkait Program Bantuan Sosial Tunai. Selain itu, Pemerintahan Kelurahan Timbang Galung juga menggunakan aplikasi *whatsapp* sebagai media komunikasi dan berbagi informasi terkait Program Bantuan Sosial Tunai. Oleh sebab itu, penggunaan teknologi memiliki manfaat yang cukup besar dalam pelaksanaan Program Bantuan Sosial Tunai seperti menginput data menjadi lebih efektif tidak menghabiskan waktu yang cukup lama dibandingkan dengan pengerjaan secara manual.

Hasil obesrvasi peneliti bahwa Pemerintahan Kelurahan Timbang Galung hanya menggunakan teknologi seperti komputer, laptop, *handphone*, printer, *microsoft word*, dan menggunakan *microsoft excel* untuk memasukkan data calon penerima program BST. Peneliti juga melihat Pemerintahan Kelurahan Timbang Galung belum sepenuhnya memahami menggunakan teknologi yang digunakan dalam pelaksanaan program Bantuan Sosial Tunai. Program Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Timbang Galung. Namun, Pemerintahan Kelurahan Timbang Galung belum sepenuhnya paham dalam menggunakan teknologi yang ada. Oleh karena itu, perlu adanya pelatihan untuk Pemerintahan Kelurahan Timbang Galung dalam menggunakan teknologi agar menjadi lebih baik lagi.

#### Karakteristik Lingkungan

Karakteristik lingkungan terbagi atas dua bagian yaitu lingkungan luar (*ekstern*) dan lingkungan dalam (*intern*). Menurut Steers (2020: 101) mengatakan bahwa lingkungan luar (*ekstern*) umumnya menggambarkan kekuatan yang berada di luar organisasi. Steers (2020: 101) juga mengatakan bahwa lingkungan dalam (*intern*) yaitu faktor-faktor di dalam organisasi yang menciptakan budaya dan sosial tempat berlangsungnya suatu program ke arah tujuan.

##### 1. Lingkungan Luar (*Ekstern*)

Lingkungan luar (*ekstern*) adalah lingkungan yang berada di luar organisasi yang dapat mempengaruhi keputusan dan tindakan dalam suatu organisasi. Program Bantuan Sosial Tunai (BST) dikeluarkan dalam rangka mengurangi dampak pandemi COVID-19, mendorong pergerakan roda perekonomian serta membantu meringankan beban masyarakat di tengah pandemi COVID-19.

Dampak pandemi COVID-19 bagi keluarga miskin dan rentan miskin yakni berkurangnya pendapatan dan kehilangan pekerjaan yang berakibat pada kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi kehidupan masyarakat yang sangat nyata terancam dengan merebak dan menyebarnya COVID-19, baik dari aspek keselamatan jiwa karena ancaman kesehatan dan keselamatan, maupun kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat. Akibat dampak COVID-19 Kementerian merespon dengan memberikan bantuan sosial sembako maupun tunai salah satunya yaitu Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk penanganan dampak COVID-19.



Berdasarkan hasil obesrvasi peneliti di Kelurahan Timbang Galung terkait lingkungan luar yang berpengaruh terhadap munculnya Program Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kelurahan Timbang Galung adalah program tersebut muncul karena adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang membuat masyarakat terdampak COVID-19 merasakan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya serta berkurangnya pemasukan pendapatan karena terkena PHK dan usaha dagangan yang tidak laku. Peneliti juga melihat dampak COVID-19 yang menyebar ke seluru dunia termasuk Indonesia. Hal tersebut membuat pemerintah mengeluarkan Program Bantuan Sosial untuk membantu masyarakat miskin terdampak COVID-19.

## 2. Lingkungan Dalam (*Intern*)

Lingkungan dalam adalah lingkungan yang berada di dalam organisasi terkait dengan lingkungan kerja atau iklim organisasi. Kualitas iklim organisasi yang baik merupakan pengaruh yang sangat besar terhadap efektivitas program. Iklim organisasi yang kondusif juga sangat bermanfaat untuk meningkatkan kinerja organisasi yang dapat berpengaruh terhadap pengelolaan dan pelaksanaan program. Iklim organisasi yang mementingkan pekerja dengan komunikasi terbuka, dukungan bersama dan desentralisasi pengambilan keputusan biasanya akan menjerumus pada peningkatan pekerja, berkurangnya perpindahan pekerja, berkurangnya biaya produksi dan waktu latihan pendidikan yang makin singkat (Frcderickson,dkk (dalam Steers, 2020: 129)). Pelaksanaan suatu program untuk mencapai efektivitas yaitu menciptakan iklim yang menekankan pentingnya pencapaian tujuan dan memberi dukungan bersama, kerjasama dan partisipasi pada kegiatan yang membantu pencapaian tujuan (Steers, 2020: 129).

### Gambar 2 Suasana Lingkungan Kerja Kantor Lurah Timbang Galung



*Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2021*

Gambar di atas merupakan suasana lingkungan kerja Kantor Kelurahan Timbang Galung dapat dilihat belum memiliki fasilitas yang lengkap dan ruangan kantor yang tidak rapih. Dalam gambar dapat dilihat juga tidak ada pegawai pada saat jam kerja dan suasana kantor terlihat kosong. Hal tersebut dapat menghambat setiap kegiatan pelaksanaan Program Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Timbang Galung. Terhambatnya kendala waktu yang mengakibatkan masyarakat harus menunggu untuk mendapatkan pelayanan pendaftaran maupun penyerahan berkas program BST di Kantor Lurah.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di Kantor Kelurahan Timbang Galung dapat diketahui bahwa iklim organisasi di Kantor Kelurahan Timbang Galung belum berjalan dengan baik. Peneliti melihat bahwa benar fasilitas yang ada di Kantor Kelurahan Timbang Galung belum memadai. Selain itu, peneliti juga melihat bahwa untuk bertemu dengan sekretaris lurah sangat sulit dan kurangnya kedisiplinan pegawai untuk hadir pada saat jam kerja merupakan salah satu penghambat dalam berkomunikasi antar pegawai maupun dengan masyarakat. Peneliti juga melihat ketidak hadiran pegawai merupakan faktor penghambat untuk masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat terkait pelaksanaan Program Bantuan Sosial Tunai. Oleh karena itu, diharapkan setiap pegawai untuk dapat hadir setiap jam kantor agar mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan sehingga tercapainya efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Timbang Galung.

## Kebijakan dan Praktik Manajemen

Kebijakan Praktek Manajemen mencakup dua bagian yaitu pencapaian tujuan program dan komunikas. Menurut (Duncan (dalam Steers (2020: 53)) pencapaian tujuan adalah segala proses dan upaya yang dilakukan dalam pencapaian suatu tujuan. Pencapaian tujuan program yaitu untuk melihat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan program dapat dilihat dari kesanggupan manajemen untuk menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dikejar serta melihat ketepatan sasaran program agar

dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan komunikasi menurut Steers (2020: 174) adalah sarana yang dibutuhkan untuk mengkoordinasi dan mengarahkan kegiatan program kepada tujuan dan sasaran program di dalam suatu organisasi. Keberhasilan program yang dilakukan dalam sebuah organisasi dapat ditentukan berdasarkan kualitas dan teknik komunikasinya.

### 1. Pencapaian Tujuan Program

Program Bantuan Sosial Tunai adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang memiliki tujuan sasaran tertentu dengan alasan tertentu juga. Program ini muncul sebagai manifestasi dari adanya tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah yang berisi nilai-nilai dan norma yang ditujukan agar dapat memecahkan masalah suatu negara yang biasa disebut masalah kemiskinan. Kemiskinan secara umum ditandai dengan suatu kondisi yang serba terbatas, baik dalam memenuhi kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok, rendahnya peluang/ kesempatan berusaha, pendidikan, dan kebutuhan-kebutuhan hidup lainnya.

Keberhasilan suatu program merupakan tujuan atau target yang ingin dicapai dari setiap organisasi. Salah satu faktor yang menentukan efektivitas suatu program adalah tujuan program. Adapun tujuan dari Program Bantuan Sosial Tunai (BST) yaitu membantu masyarakat miskin untuk tetap menjaga daya beli masyarakat akibat wabah COVID-19. Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 18/6/SK/HK.02.02/4/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disiase* 2019 (COVID-19) disampaikan bahwa Program Bantuan Sosial Tunai merupakan pemberian bantuan berupa uang yang diberikan kepada keluarga miskin, tidak mampu atau rentan terkena dampak wabah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Berdasarkan pemaparan dari hasil wawancara dengan masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Timbang Galung dapat diketahui bahwa masyarakat maupun pemerintahan masih belum mengetahui secara jelas target sasaran dari Program Bantuan Sosial Tunai (BST). Hal tersebut menyebabkan banyaknya masyarakat yang mendaftarkan diri untuk mendapat bantuan tanpa mengetahui sasaran penerima program BST yang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 18/6/Sk/Hk.02.02/4/2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Oleh sebab itu, perlunya pemberian pemahaman secara mendalam terkait sasaran Program BST kepada Pemerintahan Kelurahan Timbang Galung maupun masyarakat bertujuan untuk mengurangi ketidaktepatan sasaran penerima program serta melonjaknya pendaftar Program BST.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di Kelurahan Timbang Galung terkait target sasaran Program Bantuan Sosial yaitu benar adanya masyarakat yang menerima Program Bantuan Sosial Tunai adalah masyarakat mampu. Pada saat tahap pencairan peneliti melihat bahwa uang yang digunakan bukan untuk kebutuhan pokok melainkan untuk kebutuhan skunder seperti membeli *handphone*. Selain itu, peneliti melihat salah satu masyarakat yang menerima manfaat program BST yaitu masyarakat memiliki kendaraan roda empat kepemilikan sendiri. Hal tersebut menyebabkan ketidaktepatan sasaran penerima program yang mengakibatkan pencapaian tujuan dari Program Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Timbang Galung tidak tercapai.

### 2. Komunikasi

Komunikasi menurut Steers (2020: 174) adalah sarana yang diperlukan untuk mengarahkan kegiatan program kepada tujuan dan sasaran program di dalam suatu organisasi. Komunikasi bertujuan untuk pengiriman dan penerimaan pesan antara dua orang atau lebih. Komunikasi yang digunakan dalam pengiriman dan penerimaan pesan yaitu komunikasi verbal merupakan komunikasi yang disampaikan lewat kata-kata lisan maupun tulisan. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar menyampaikan informasi dengan lisan maupun tulisan kepada Kantor Kelurahan Timbang Galung yang selanjutnya akan disampaikan kembali ke Ketua Rukun Tetangga dan diteruskan ke masyarakat.

Penyampaian informasi antara Pemerintah kelurahan Timbang Galung dengan masyarakat dilakukan dengan sosialisasi program. Sosialisasi menurut Budiani (2007: 53) adalah sosialisasi yaitu kemampuan pelaksana program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan peserta sasaran program.



Gambar 3 Sosialisasi dalam Bentuk Media Sosial



Sumber: Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2021

Gambar diatas merupakan satu contoh sosialisasi Program Bantuan Sosial Tunai yang dilakukan secara tidak langsung (*online*) dengan mengirimkan *flyer* mengenai Program Bantuan Sosial Tunai di Indonesia tersebut ke sosial media. Tujuan *flyer* tersebut di *upload* ke media sosial yaitu sebagai media informasi untuk masyarakat maupun pemerintah agar bisa dengan mudah diakses oleh siapapun. Sedangkan untuk sosialisasi Program Bantuan Sosial Tunai yang dilakukan secara langsung dengan menggunakan media cetak seperti poster, surat kabar atau koran.

Berdasarkan hasil observasi peneliti terkait sosialisasi yang dilakukan di Kelurahan Timbang Galung yaitu pihak Kelurahan tidak ada melakukan sosialisasi kepada RT maupun masyarakat Kelurahan Timbang Galung. Pihak kelurahan hanya menyampaikan kepada RT untuk mendaftarkan dan mengumpulkan berkas masyarakat yang terdampak COVID-19 untuk mendapatkan program BST. Selain itu, masih terdapat masyarakat yang tidak mengetahui adanya Program Bantuan Sosial Tunai sehingga masyarakat yang membutuhkan bantuan program BST tidak mendaftarkan diri sebagai calon penerima peserta program.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar mengenai Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai kepada Masyarakat Terdampak Pandemi COVID-19 di Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar belum berjalan dengan baik sesuai dengan indikator efektivitas yang harus dipenuhi. Alasannya yaitu, Kurangnya ketelitian petugas dalam proses pendataan peserta dan masih terdapat unsur kekerabatan antara petugas dengan masyarakat mengakibatkan program BST di Kelurahan Timbang Galung belum tepat. Iklim organisasi di Kantor Kelurahan Timbang Galung belum berjalan dengan efektif, kurangnya kedisiplinan pegawai untuk hadir pada saat jam kerja merupakan salah satu penghambat efektivitas pelaksanaan program BST. Selain itu, Kebijakan Praktek Manajemen terkait pencapaian tujuan program BST di Kelurahan Timbang Galung masih belum efektif karena masih terdapat masyarakat layak yang mendapatkan program BST. Komunikasi antara Pemerintah dengan masyarakat dilakukan dengan sosialisasi program. Pelaksanaan sosialisai di Keluraha Timbang Galung belum berjalan dengan baik dikarenakan Pemerintah tidak ada melakukan sosialisai terkait Program BST kepada masyarakat sehingga terdapat masyarakat yang tidak mengetahui adanya Program BST.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan untuk meningkatkan Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai kepada Masyarakat Terdampak Pandemi COVID-19 di Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar antara lain, struktur organisasi yaitu pembagian tugas diharapkan dapat dilakukan pengawasan yang ketat dalam proses pendataan dan perlu adanya survei terlebih dahulu sebelum mencalonkan masyarakat sebagai penerima program BST. Terkait teknologi diharapkan perlu dilakukan pelatihan dalam menggunakan teknologi untuk setiap Pegawai Kelurahan Timbang Galung agar lebih mahir dalam menggunakan teknologi yang ada. Karakteristik Lingkungan terkait lingkungan dalam (*intern*) diharapkan Pemerintahan Kelurahan dapat meningkatkan komunikasi dan memberikan informasi yang merata kepada setiap RT. Diharapkan kepada Pegawai Keluraha Timbang Galung untuk meningkatkan kedisiplinan kerja untuk datang pada saat jam kantor agar setiap masyarakat

mendapatkan pelayanan yang efektif. Kebijakan Praktek Manajemen terkait pencapaian tujuan program BST di Kelurahan Timbang Galung diharapkan petugas dapat mendata peserta program BST lebih valid dan melakukan kembali penginputan data baru penerima program BST sehingga tidak terjadi kesalahan sasaran program dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan terkait komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan Timbang Galung diharapkan dapat ditingkatkan kembali dengan melakukan sosialisasi secara intensif antara Pemerintahan Kelurahan Timbang Galung kepada masyarakat sehingga setiap masyarakat dapat mengetahui secara jelas Program Bantuan Sosial Tunai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Budiani, Ni Wayan. (2007). Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna (Eka Taruna Bhakti) Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar”, *Jurnal Ekonomi Dan Sosial*. Vol. 2 No.1.
- Hanoatubun, Silpa. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia. *Journal of Education, Psychology and Counseling*, 2(1): 146- 153.  
<https://www.bpa.go.id/>, diakses pada 2 Juli 2021.
- Julia, Sopha. (2010). Efektifitas Program Bantuan Operasional Sekolah. Tesis. Ilmu Administrasi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Indonesia: Jakarta
- Kaharudin, M. Robby. (2020). “*Social Safety Net* Pada Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Miskin Di Kota Palembang. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, 8(1): 99-121
- Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 18/6/Sk/Hk 02.02/4/2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).
- Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 161/Huk/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Tahun 2021.
- Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 86/Huk/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/Huk/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).
- Kurniawan. (2005). *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan.
- Livana. PH., Resa Hadi Suwoso., Terri Febrianto., Dani Kushindarto., & Firman Aziz. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Bagi Perekonomian Masyarakat Desa. *Indonesian Journal of Nursing and Health Sciences*, 1(1): 37-48.
- Mahsun. M. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Makmur. (2011). *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama.
- Melati & Zulkarnaini. (2021). Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Pasir Pengaraian. *Journal Publicuho*, 4(1): 19-26.
- Nomor 22/6/Sk/Hk.02.02/6/2020 Tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Fakir Miskin Nomor 18/6/Sk/Hk/02.02/4/2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak *Corona* (Covid-19).
- Paitoonpong, S., Abe, S., & Puopongsakorn, N. (2008). The Meaning of “Social Safety Nets”. *Journal of Asian Economics*, 467-473.
- Parikesit, Gengsar. 19 Februari 2021. Saling Silang Perkara Bantuan. <https://koran.tempo.co/read/metro/462459/setumpuk-masalah-pendataan-bantuan-sosial-tunai-covid-19?>
- Pasolong, Harbani. (2017). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sianturi, Arnold H. 19 Mei 2020. Polda Sumut Usut Dugaan Penyimpangan Bantuan Sosial di 5 Daerah. <https://www.beritasatu.com/nasional/634791/polda-sumut-usut-dugaan-penyimpangan-bantuan-sosial-di-5-daerah>
- Steers, Richard. M. (2020). *Efektivitas Organisasi Kaidah Peri Laku*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumantri, Dwi Adriani. 2021. *Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai kepada Masyarakat Terdampak Pandemi COVID-19 di Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar*. Medan: USU.
- Sumodiningrat, Gunawan. (1999). Jaringan Pengaman Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 14(3).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19